

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku-buku :

- Gautama, Sudargo dan Ny. Sukahar Badwi, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1975.
- Gautama, Sudargo dan Ellyda T. Soetiyarto, Komentar Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Pokok Agraria (1996), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, Cet. Kesebelas, 1992 dan Cet. Kelimabelas (Edisi Revisi), 2002.
- Madjloes, Beberapa Petunjuk Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alumni, Bandung, 1974.
- Marhiyanto, Bambang, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre, Surabaya.
- Parlidungan, A.P., Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alumni, Bandung, 1978.
- Subekti R, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 12, 1999.
- Soedjendro, J. Kartini Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, Kanisius, Cet.5, Yogyakarta, 2001.

Makalah :

- Hardaseputra, R.H., Makalah, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta, Seminar Nasional Jaminan Fidusia, Manado, 24 Januari 2000.

Majalah :

Lotulung, Paulus Effendie, Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Fungsi PPAT Menurut PP. Nomor 10 Tahun 1961, Media Notariat, No. 38, Januari 1996.

Santoso, Urip, Tinjauan Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah, Media Hukum, Edisi 4/Thn. V, Mei 1998.

Setiawan, Wawan, Kedudukan dan Keberadaan Notaris Sebagai Pejabat Umum Menurut Sistim Hukum Dibandingkan Dengan Pejabat Tata Usaha Negara, Media Notariat, No. 38, Januari 1996

Winarsi, Sri, Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum, Yuridika, Volume 17, No. 2, Maret 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek (Stb.1848 Nomor 10 Tahun 1848),
terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang, Penunjukan Pejabat yang Dimaksud dalam Pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Stb. 1860 Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris.